

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

American Association on Mental Deficiency, 1719, *Classification In Mental Retardation*, AAMD, Washington DC.

Abdulkadir, M, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Alma, Bandung.

Andi, H, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Cholid N.,& Achmadi, A, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Hanitijo, R. S, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejono, & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soeroso, R., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno, M., 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.

Subekti, R., 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bandung.

Van Apeldoorn, L. J., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Wiasa, I.N.D., 2022, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*, CV Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah.

Wulan, K., Suryoputro, A., Sriatmi, A. & Budiyanti, R. T, 2021, *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan: (Tanggung Jawab Hukum Dalam Upaya Kesehatan)*, FKM Press Universitas Diponegoro, Semarang.

Titiek, T., & Febrian, S, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yusuf, A.H., Fitryasari, R.P.K., & Nihayati, H.E., 2015, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien,
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar Kota Magelang.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Magelang
- Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.01.07/XXVI.3/2293/2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Terpadu di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.
- WHO. 1978. Declaration of Alma-Ata. International Conference on Primary Health Care. Alma-ata. USSR.

c. Artikel Ilmiah

- Arifianto, M. S., & Susilowati, I, 2019, Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang di Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Jogoroto), *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 6, No 1.
- Amalita, A.R., Alawiya,N., & Utami, N. A. T, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Soedirman Law Review*, Vol. 2, No.1, 72-83.
- Amanda, N., Liandi, V.V., Karimah, N., Dhaniswara, P., & Sulastri, 2024, Perjanjian Tidak Bernama, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 , No 3.
- Harjani, & Lestari, I, 2021, Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Terlantar di PSBL 1 DKI Jakarta, *EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1. 55-66.
- Jibril, M., Hudaya, H.S., & Pradana, G.M., 2021, Kedudukan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 11. 2107-2124
- Rinawati, F., & Mansur, M.A., 2016, Analisa Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stress Stuart. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 5, No.1, 34-38.
- Rohman, A., & Mediawati, N.F., 2024, Analisis Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Secara Daring. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, Vol.3, No.1.
- Sari, A.P., & Susanti, L., 2024, Pendidikan Berkebutuhan Khusus pada Anak Tunalaras (Gangguan Sosial-Emosi). *Educational Journal of Innovation and Publication (EJIP)*, Vol.3, No.1
- Syahbana, D., 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di Rumah Singgah, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6, No.2, 539-550.
- Semeru, F., & Tanawijaya, H., 2022. Inspanning Verbintenis dalam Tindakan Medis yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktik. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No 2, 490-512.

d. Hasil Penelitian

Human Rights Watch, 2016, *Living in Hell: Abuse against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*. Hasil Penelitian, Human Rights Watch, Amerika Serikat.

e. Internet

Amalia, R., 2022, *Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt6348171197e9/>, Diakses 17 Januari 2025

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022, *Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jawa Tengah Tahun 2021*, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYwNyMx/rekap-data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-provinsi-jawa-tengah-2021.html>, Diakses 12 Desember 2024

Dinas Sosial Kota Magelang, *Data Kesejahteraan Sosial*, <http://dinsos.magelangkota.go.id/data-kesejahteraan-sosial/>, Diakses pada 12 Desember 2024

Dinas Sosial Kota Magelang, 2022, *Dinas Sosial Wujudkan Layanan Yang Humanis*. Retrieved from <http://dinsos.magelangkota.go.id/dinas-sosial-wujudkan-layanan-yang-humanis/>, Diakses 28 Mei 2024

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2021, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024*. <https://kemensos.go.id/renstra-ditjen-rehabilitasi-sosial-tahun-2020-2024>

Tim Hukumonline, 2023, Hubungan Hukum : Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>? Diakses pada 6 September 2024

Ramadhan, A.,& Setuningsih, N., 2023, Pemerintah Siapkan Anggaran Kesehatan Rp 186,4 Triliun, 5,6 Persen dari APBN. <https://www.kompas.com/read/2023/0816/15011431/pemerintah-siapkan-anggaran-kesehatan-rp-1864-triliun-56-persen-dari-apbn>. Diakses pada 2 September 2024.

Rokom, 2021, Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>, Diakses pada 25 November 2024.

RS Soerojo, 2022, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

RS Soerojo, Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Magelang, <https://soerojohospital.co.id/dokumen/pengumuman/o7O4w0mJbT6>

jxqSbyed9ncDnmD9NvZARiGRuRgqC.pdf, Diakses PADA 15
November 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024, 25 Persen Warga Jateng Alami
Gangguan Jiwa Ringan, [https://jatengprov.go.id/publik/25-persen-
warga-jateng-alami-gangguan-jiwa-ringan/](https://jatengprov.go.id/publik/25-persen-warga-jateng-alami-gangguan-jiwa-ringan/), Diakses Pada 25
November 2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2024, Kepesertaan JKN-KIS Capai
99,13%, Pemkot Magelang Peroleh Sertifikat UHC,
[https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kepesertaan-jkn-kis-capai-
9913-pemkot-magelang-peroleh-sertifikat-uhc/](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kepesertaan-jkn-kis-capai-9913-pemkot-magelang-peroleh-sertifikat-uhc/), Diakses Pada 13
April 2025

Pols, H, 2020, Masa Depan Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia, *Inside
Indonesia*. [https://www.insideindonesia.org/editions/edition-141-jul-
sep-2020/masa-depan-layanan-kesehatan-jiwa-di-indonesia](https://www.insideindonesia.org/editions/edition-141-jul-sep-2020/masa-depan-layanan-kesehatan-jiwa-di-indonesia). Diakses
pada 1 September 2024.

World Health Organization, 2016, Mental Health Disorders,
<https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en>. Diakses 7
Juni 2024.